

Tiada Hari Tanpa Konstruksi Bukan Proyek "Bandung Bondowoso" Pembangunan IKN Terus Menggeliat

Siapa bilang IKN seperti mati suri sepi pembangunan. Faktanya, hingga sekarang ibu kota baru itu seperti "tidak tidur". Aktivitas siang dan malam dikejar.

DIREKTUR Utama Kaltim Post Ivan Firdaus memimpin rombongan dua mobil, dari Gedung Biru Kaltim Post di Balikpapan. Pria berkacamata tersebut berangkat pada Rabu (22/1) Pukul 10.00 Wita. Didampingi jajaran direktur dan manajemen lainnya. Setelah menghadiri HUT ke-14 Balikpapan TV (Kaltim Post Group).

Setelah melalui Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), satu lagi mobil awak Kaltim Post dari Samarinda ikut bergabung di Kilometer 38 Samboja, Kutai Kartanegara. Tiga kendaraan lantas mengaspal beriringan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui jalan negara Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

RINCIAN ANGGARAN IKN	
Tahap I (2022-2024)	Tahap II (2025-2029)
Rp89 triliun	Rp48,8 triliun

Dibanding Tahap I dan II terjadi penurunan Rp40,2 Triliun

Sebagai Dirut Kaltim Post, Ivan Firdaus ingin melihat kembali IKN secara langsung. Bukan sekedar lewat media, apalagi media sosial (medsos), yang belakangan santer dengan opini dan berita miring.

Menyebut IKN masih sepi pembangunan, pun tak terawat karena dirambati tanaman. Meski sudah banyak berita klarifikasi, namun menyaksikan dengan mata sendiri adalah bentuk mengecek fakta sebenarnya. Sekaligus mencari jawaban, nasib IKN ke depan setelah bergantinya rezim pemerintahan.

Dalam perjalanan, khususnya saat memasuki wilayah Sepaku, secara kasatmata, daerah ini semakin berkembang. Berdirinya hotel, penginapan, rumah makan, kafe, dan infrastruktur lain penunjang kegiatan ekonomi lainnya bertumbuh. Pun secara kepadatan lalu lintas, kerap ditemukan kendaraan kecil dan truk pengangkut material dan logistik jalan beriringan.

Setelah sempat makan siang di rumah makan milenial di Desa Sukaraja, pukul 13.30 Wita, rombongan tiba di titik pertama. Di Swisshotel Nusantara, hotel bintang lima pertama yang dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo pada 13 September 2024 lalu, dengan nilai investasi Rp5 triliun. *Internasional chain* hotel itu dibangun oleh Konsorsium Nusantara yang dipimpin Sugianto Kusuma atau Aguan hanya dalam tempo 9 bulan.

"Kami sudah *full operation* dengan 191 kamar dengan berbagai fasilitasnya dan akan terus kami tambah. Termasuk *next*, akan bangun mal di depan hotel ini oleh *ownernya* yang sama dengan Swisshotel. Lalu yang saya dengar akan banyak hotel internasional

dan mal lain akan dibangun, meski tidak dalam tahun ini,” ucap *General Manager* Swisshotel Nusantara Christian Pesik yang menyambut hangat rombongan Kaltim Post. Dirinya yang tiba di IKN pada Oktober tahun lalu terkesan dengan cepatnya pembangunan. Setiap hari dirinya memerhatikan, siang dan malam. Kerap dirinya berkeliling di atas jam 10 malam, lampu-lampu masih menyala dan tampak pekerja masih sibuk membangun.

“Saya melihat IKN sangat pesat pembangunannya. Tiada hari tanpa konstruksi. Hari ini saya melihat kosong, besok sudah ada tiang-tiang berdiri. Contohnya gedung apartemen di sebelah hotel ini. Saat saya pertama datang, itu rangka saja belum ada. Sekarang sudah berdiri dan lampunya sudah nyala,” bebernya.

Perjalanan rombongan Kaltim Post dilanjutkan ke Qubika Boutique Hotel. Hotel berkonsep minimalis modern itu dibangun dari susunan lebih dari 200 kontainer berukuran 40 kaki. Satu dari sekian proyek PT Karya BSH Mandiri yang tergabung dalam BSH *Community Hub* IKN. *Groundbreaking* proyek itu dilakukan pada 21 Desember 2023 dengan nilai investasi sebesar Rp100 miliar, dan rencananya akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kami hotel bintang 3 yang dipercaya sebagai pionir pengusung *eco-friendly*, sesuai konsep IKN. Punya 206 kamar dengan berbagai fasilitas seperti *ballroom* berkapasitas 800 orang. Targetnya Februari ini akan rampung. Untuk *opening*-nya, ini kami masih menunggu untuk disatukan dengan agenda Pak Presiden Prabowo,” ungkap *General Manager* Qubika Boutique Hotel Iwan Kurniawan.

INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN

Dari Qubika, rombongan Kaltim Post bergerak ke arah istana. Meski salah satu kendaraan sempat terjebak lumpur, namun perjalanan berkeliling IKN cukup mengejutkan sejumlah awak yang terakhir berkunjung tahun lalu. Pasalnya, banyak perubahan yang terlihat.

Di antara masyarakat yang berkunjung, pekerja dan kendaraan pengangkut material yang hilir mudik, gedung dan bangunan terus bertumbuh dan bertambah.

Termasuk infrastruktur penunjang kerja para pejabat negara dan aparat sipil negara (ASN) yang disebut-sebut akan pindah pada setelah Idul Fitri tahun ini.

Saat itu sudah sore, matahari sudah di ufuk. Di sebuah kafe yang lokasinya berseberangan di depan kompleks Istana Garuda yang “menghijau”, Ivan Firdaus dan rombongan Kaltim Post bertemu dengan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ikn (OIKN) Alimuddin.

Ya, sehari sebelum kunjungan rombongan Kaltim Post, Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Itu disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono setelah mengikuti

rapat terbatas terkait IKN di istana Presiden, Jakarta, pada Selasa (21/1). “Rp48,8 triliun tadi Bapak Presiden (Prabowo) sudah setuju untuk dialokasikan di IKN untuk menyelesaikan tadi (sejumlah proyek),” ujar Basuki.

Dia mengungkapkan, pada tahap kedua pembangunan IKN yaitu tahun 2028, Prabowo mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik. Dia berikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya.

Untuk menyelesaikan target tersebut tahun 2025-2029 diperlukan anggaran sebesar Rp48,8 triliun. “Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” ujar Basuki.

Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai. “Jadi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang menyerahkan pada Otorita IKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” terang mantan Menteri PUPR itu.

Di samping itu, Kepala Otorita IKN juga mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki program yang dibiayai melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun yang sedang berproses. “Sudah kami proses sampai dengan *feasibility study*, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi,” ujar Basuki.

Kemudian, untuk enam proyek KPBU pembangunan jalan dan *multi utility tunnel* (MUT) sepanjang 138,6 kilometer di KIPP IKN. “Selama ini yang akan dikerjakan baru sebagian. Itu akan kami lanjutkan dengan KPBU,” ujar Basuki. Lebih lanjut, terdapat satu proyek KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Kemudian, Basuki melaporkan untuk *groundbreaking* proyek investasi di IKN tahap kesembilan. “Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp6,49 triliun,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan bahwa 27 tower di IKN sudah siap untuk diresmikan. Selain itu, rumah jabatan menteri juga sudah siap diresmikan. **(rd)**

Yang sedang dan akan berjalan, pembangunan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sudah mencapai Rp60 triliun. Dengan pembangunan sebagai berikut:

1.	97 tower apartemen
2.	129 rumah tapak
3.	6 proyek jalan
4.	27 tower untuk hunian ASN hingga rumah jabatan menteri
5.	Multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 kilometer

6.	Satu proyek KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang merupakan kerja sama antara PT PLN dan Sembawang Corporation (Sembcorp)
----	--

Progres Pembangunan IKN

Tahap I	Sudah 97 persen
Tahap II	Mulai pembangunan

RENCANA TERDEKAT

Dalam <i>groundbreaking</i> yang ke-9 di IKN terdapat enam proyek, terdiri dari hotel, perkantoran, dan restoran.
Nilai investasinya mencapai Rp6,5 triliun .
Pelaksanaan <i>groundbreaking</i> masih menunggu kesediaan waktu Presiden Prabowo Subianto

Sumber berita:

1. KALTIMPOST, Tiada Hari Tanpa Konstruksi Bukan Proyek “Bandung Bondowoso”, Pembangunan IKN Terus Menggeliat, 26/01/25

Catatan:

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan
 - b. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah.
- (3) Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang ini atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 (tiga) penahapan pembangunan ibu kota nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.